

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adam, Chazawi , Pelajaran Hukum Pidana bagian I, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002).
- Al, Achmad, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, (Jakarta : Kencana, 2009).
- Arief, Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).
- \_\_\_\_\_ , Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014).
- Asshidiqqie, Jimly, Hukum Tata Negara Darurat, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), halaman 26.
- Badan Narkotika Nasional, Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, (Jakarta : Badan Narkotika Nasional, 2007).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan), (Jakarta : BPHN, 2008).
- BNNK Temanggung, Laporan Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Operasional Asesmen Terpadu-Case Conference Tersangka Rachmat Tri Waluyo Al. Mamat Bin Wasono, (Temanggung : Seksi Rehabilitasi BNNK Temanggung, 2018).
- Delyana, Shanti, Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta : Liberty, 2004).
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010).
- Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010).
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, Hukum Pidana Khusus, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016).

- Kartono, Patalogi Sosial, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003).
- Kementerian Kesehatan RI, Pusat data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, “Anti Narkoba Sedunia” (Jakarta : Kementerian Kesehatan RI, 2017).
- Makarao, Moh.Taufik. dkk, Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003).
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Mulyadi,Lilik, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, (Bandung : Bunga Rampai, 2007).
- \_\_\_\_\_, Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus terhadap : Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2012).
- Raharjo,Satjipto, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Semarang : Penerbit Genta Publishing, 2009).
- Ratna WP, Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009), (Yogyakarta : Legality, 2017).
- Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum, (bandung: Refika Aditama, 2007).
- Sujono A.R. dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).
- Sasangka, Hari, Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana, (Bandung : Mandar Maju, 2003).
- Sudarto, Kapita Selektas Hukum Pidana, (Bandung : PT. Alumni, 2010).
- Soekanto,Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
- Satuan Reserse Narkoba Polres Temanggung, Data Pelaksanaan Asesmen Terpadu terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika, (Temanggung : Satres Narkoba Polres Temanggung, 2019).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990).

Supramono, Gatot, Hukum Narkoba Indonesia, (Jakarta : Djambatan, 2007).

Waluyo, Bambang, Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).

Roni, Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : Mandar Maju, 2012).

Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia), (Bandung : Widya Padjajaran, 2011).

## **B. Undang-undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi PBB Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 Tentang Wajib Laporan Pecandu Narkotika.

Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 2415/ MENKES/ PER/ XII/ 2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Peraturan Menteri Sosial No. 03 Tahun 2012 Tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Peraturan Kepala BNN No. 5 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Rehabilitasi BNN.

- Peraturan Kepala BNN No. 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.
- Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Rehabilitasi Sosial.
- Peraturan Kepala BNN No. 16 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
- Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/ atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
- Peraturan Kepala BNN No. 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.
- Peraturan BNN RI No. 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 422/menkes/sk/iii/2010 tentang Pedoman Penatalaksanaan Medik Gangguan Penggunaan Napza.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : Se-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

### C. Jurnal

Anton Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia, Adil Jurnal Hukum Volume 8 No.1 Tahun 2017, [academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/457](http://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/457), diakses pada 7 Januari 2019.

Hatarto Pakpahan, Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan bagi Penggina dalam Tindak Pidana Narkotika, Jurnal Arena Hukum Volume 7 Nomor 2 Tahun 2014, <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/159/158>, diakses pada 11 April 2019.

Herlambang P. Wiratman, Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya, Makalah untuk Stadium Generale Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga (9 April 2016), <https://herlambangperdana.files.wordpress.com>, diakses pada 13 April 2019.

Indira Hapsari, dkk., Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak, *Diponegoro Law Journal* Volume 5 No. 3 Tahun 2016, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>, diakses pada 18 November 2018.

Saiful Abdullah, Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dan Non Hukum Pidana (Non Penal) dalam Menanggulangi Aliran Sesat, *Law Reform* Volume 4 No. 2 Tahun 2009, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/700>, diakses pada 1 Februari 2019.

Simamora,Janpatar, Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum Volume 25 Issue 3 Tahun 2013.

Zainab, Ompu Jainah, Persepsi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang), Masalah-Masalah Hukum Jilid 41

No. 2 Tahun 2012,  
ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/57459834, diakses  
pada 9 November 2018.

#### D. Internet

Balai Besar Rehabilitasi BNN, Profil Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, ([babesrehab-bnn.info/index.php/profil](http://babesrehab-bnn.info/index.php/profil), diakses pada 13 April 2019).

BNNK Temanggung, Visi dan Misi BNN, <https://temanggungkab.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn/>, diakses pada Kamis 11 April 2019.

BNNK Temanggung, Rehabilitasi Berkelanjutan/ Rehabilitasi, (<https://temanggungkab.go.id/rehabilitasi/rehabilitasi-berkelanjutan-rehabilitasi/>, diakses pada 13 April 2019).

BNNP Bali, "Tentang Rehabilitasi", (<http://bali.bnn.go.id/uncategorized/tentang-rehabilitasi/>, 31 Oktober 2018).

BNN RI, Tim Asesmen Terpadu (TAT) Tingkat Kabupaten Temanggung Tahun 2017, (<https://bnn.go.id/blog/beritakegiatan/tim-asesmen-terpadu-tattingkat-kabupaten-temanggung-tahun-2017/>, diakses pada 16 April 2019).

DPR RI, Ada Kerancuan Pasal 112 dan 127 UU Narkotika, ([www.dpr.go.id/berita/detail/id/17882/t/Ada+Kerancuan+Pasal+112+dan+Pasal+127+UU+Narkotika](http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/17882/t/Ada+Kerancuan+Pasal+112+dan+Pasal+127+UU+Narkotika), diakses pada 16 April 2019).

Fana Suparman, Mulai Hari Ini Pecandu Narkoba yang Tertangkap Tangan akan Direhabilitasi, (<http://www.beritasatu.com/hukum/205397-mulai-hari-ini-pecandu-narkoba-yang-tertangkap-akan-direhabilitasi.html>, diakses pada 18 November 2018).

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>, diakses pada 18 November 2018.

<https://www.kompasiana.com/hakamain.com/54f6eb1aa333114e708b462f/ku-alifikasi-penyalahgunaan-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-dalam-implementasi-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018.

ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*), Pengguna dan Pecandu di Penjara Perburuk Kondisi LAPAS, (<http://icjr.or.id/pengguna-dan-pecandu-di-penjara-perburuk-kondisi-lapas/>, diakses pada 18 November 2018).

Kepolisian Negara RI, Struktur Organisasi Polri, (<https://www.polri.go.id/tentang-struktur.php>, diakses pada Kamis 11 April 2019).

Muhammad Radityo Priyasmoro, BNN: Pemakai Narkoba di Indonesia Capai 3,5 Juta Orang pada 2017, (<https://www.liputan6.com/news/read/3570000/bnn-pemakai-narkoba-di-indonesia-capai-35-juta-orang-pada-2017>, diakses pada 18 November 2018).

[rehabilitasi.bnn.go.id/public/articles/read/267](http://rehabilitasi.bnn.go.id/public/articles/read/267), diakses pada tanggal 25 Oktober 2018.

Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang, Rehabilitasi Napza, Memabangun Kualitas Hidup Lebih Baik, (<https://rsjsoerojo.co.id/2018/07/13/rehabilitasi-napza-membangun-kualitas-hidup-lebih-baik/>, diakses pada 13 April 2019).

Rezafaraby, Tinjauan Pengaturan dan Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), ([http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/165732-1-Konten\\_1-Konten%2080-95](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/165732-1-Konten_1-Konten%2080-95), diakses pada 18 November 2018).

SIRENA (Sistem Informasi Rehabilitasi Narkoba), “Tahap-Tahap Pemulihan Pecandu Narkoba”, ([rehabilitasi.bnn.go.id/public/articles/read/267](http://rehabilitasi.bnn.go.id/public/articles/read/267), 13 Oktober 2016).

[www.malangtimes.com/baca/23771/20180103/155317/ada-tim-asesmen-terpadu-dalam-kasus-narkoba-bisa-beri-rekomendasi-ke-hakim/](http://www.malangtimes.com/baca/23771/20180103/155317/ada-tim-asesmen-terpadu-dalam-kasus-narkoba-bisa-beri-rekomendasi-ke-hakim/), diakses pada tanggal 25 Oktober 2018.

## **E. Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Djoko Sulistyono selaku Kasi Rehabilitasi BNNK Temanggung, pada tanggal 6 Maret 2019.

Wawancara dengan Bapak Sri Haryono selaku Kasat Narkoba Polres Temanggung dan anggota tim hukum Tim Asesmen Terpadu tingkat Kabupaten Temanggung Tahun 2019, pada tanggal 14 Maret 2019.

Wawancara dengan Bapak Suyadi selaku Penyidik Polres Temanggung, pada tanggal 14 Maret 2019.

Wawancara dengan Ibu R.Rini Isyanti selaku dokter dan instruktur rehabilitasi di Lapas Kelas II A Magelang, pada tanggal 8 April 2019.

Wawancara dengan Bapak Prayitno selaku Kasi Bisnadik di Lapas Kelas II A Magelang, pada tanggal 8 April 2019.

Wawancara dengan Bapak Agus Triyono selaku petugas Rutan Kelas II B Temanggung, pada tanggal 16 April 2019.